



**ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
TENTANG PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN
PELANGGAN (PSAK 72 TAHUN 2017) PADA PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Maya Cristy

022116236

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2023

**ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TENTANG
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (PSAK 72
TAHUN 2017) PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
TBK TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA.)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TENTANG
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (PSAK 72
TAHUN 2017) PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
TBK TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Jumat Tanggal 14/ Juli/ 2023

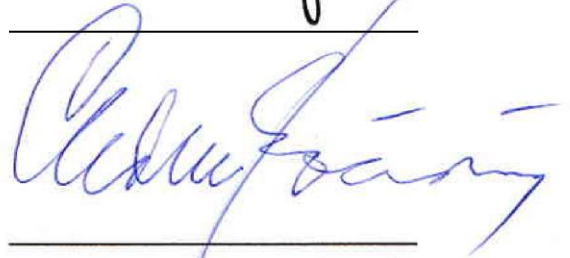
Maya Cristy
022116236

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Asep Alipudin S.E., M. Ak., CSA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA, CPA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy Surono, Drs., MM.)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Cristy

Npm : 022116236

Judul Skripsi : Analisis Dampak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 72 Tahun 2017) Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2023



Maya Cristy
022116236

**©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dan bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Maya Cristy.022116236. Analisis Dampak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 72 Tahun 2017) Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021. Pembimbing : CHANDRA PRIBADI dan SIGIT EDY SURONO, 2023

Standar akuntansi yang digunakan oleh beberapa perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar ini mengalami beberapa revisi didasarkan pada penyesuaian standar yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi setiap waktunya. Laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan atau suatu organisasi berfungsi untuk pihak dalam ataupun luar yang memiliki keperluan bisa dengan mudah melihat posisi keuangan dan prestasi kerja yang telah dicapai perusahaan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Maka dari itu, laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun mengikuti standar kebijakan yang telah ditetapkan oleh DSAK. Secara konseptual, informasi akuntansi harus dapat memenuhi kriteria yang berlaku, yang dimana pelaporan laporan keuangannya harus disajikan secara wajar dengan penjelasan tentang situasi yang sebenarnya. Salah satu bagian yang penting dari suatu penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan adalah pendapatan.

Penelitian ini dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021. Penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2019-2021 dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dengan menggunakan metode deskriptif *eksploratif*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfungsi sebagai penganalisis data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti standar kebijakan baru yaitu PSAK 72 pada tahun 2020. Ditemukan adanya implikasi yang material didalam laporan keuangan yaitu adanya reklasifikasi akun – akun antara lain “Aset Kontrak”, “Biaya Kontrak”, dan “Liabilitas Kontrak”. Dalam pengakuan pendapatan pada saat sebelum menerapkan standar baru komponen pendapatan dicatat berdasarkan produk, sedangkan dalam kebijakan baru komponen pendapatan dicatat berdasarkan *customer*. Namun tidak merubah secara signifikan pada pendapatan perusahaan.

Kata Kunci : PSAK 72, Pendapatan, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (PSAK 72 Tahun 2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2021”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran.
2. Kedua orang tua, Achmad Entan dan Atih yang tak henti dan tak bosan untuk selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi yang luar biasa bagi penulis untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.,CFE.,CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan doa dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., MM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan doa dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

8. Nandy Prasetya yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan moral dalam membuat skripsi ini.
9. Maulana Ahsan, S.M selaku sahabat yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan moral dalam membuat skripsi ini.
10. Amelia Chassanova, S.Ak., Lipi Pratiwi Kader, S. Ak., dan Sartika Indriana, S.Ak yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan dalam membuat skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2016 terutama kelas G yang setiap mata kuliahnya selalu bersama, meramaikan kelas yang hening, membawa suasana yang tak karuan, penuh canda dan tawa.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Bogor, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN... 	iii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Laporan Keuangan	7
2.1.1 Definisi Laporan Keuangan	7
2.1.2 Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan	7
2.2 Prinsip Pendapatan Berdasarkan PSAK.....	8
2.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 (PSAK 23).....	9
2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 (PSAK 72).....	10
2.2.3 Identifikasi Kontrak	12
2.2.4 Menentukan Harga Transaksi	13
2.2.5 Aset Kontrak	14

2.2.6 Biaya Kontrak.....	14
2.2.7 Liabilitas Kontrak	14
2.3 Kebijakan Akuntansi.....	14
2.3.1 Konsistensi Kebijakan Akuntansi.....	15
2.3.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	15
2.3.3 Pengakuan Atas Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi	16
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	19
2.4.1 Penelitian Sebelumnya.....	19
2.4.2 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis – jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	27
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	27
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Perkembangan Dan Kegiatan Usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	29
4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	31
4.2. Kondisi/Fakta/Pelaksana/Realisasi Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019- 2020.....	33
4.2.1 Proses Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang berkaitan dengan PSAK 72 (2017)	33
4.2.2 Penerapan PSAK (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Sebelum dan Sesudah menerapkan PSAK 72 (2017).....	34
4.2.3 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019.....	35
4.2.4 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020.....	37

4.2.5 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021	39
4.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah menerapkan PSAK 72 (2017)	41
4.3.1 Pengakuan PSAK 72 (2021) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	41
4.3.2 Penyajian PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	42
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	42
4.4.1 Pengakuan Pendapatan Sebelum Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019	42
4.4.2 Pengakuan Pendapatan Sesudah Penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020	44
4.4.3 Perbandingan Komponen Pendapatan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	47
4.4.4 Perbandingan Penyajian pada Pos-pos Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021	48
4.4.5 Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerapan PSAK tentang Pendapatan/Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.....	2
Tabel 1. 2 Penyajian/Penerapan PSAK 72 (2017) pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.....	3
Tabel 2. 1 Tahapan Pengakuan Pendapatan.....	11
Tabel 2. 2 Penelitian Sebelumnya.....	19
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 3. 2 Daftar Anak Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ...	30
Tabel 4. 1 Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 (dalam Miliaran Rupiah)	35
Tabel 4. 2 Pos Pendapatan dalam Laporan Laba Rugi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 (dalam Miliaran Rupiah).....	35
Tabel 4. 3 Pos – pos dalam Laporan Posisi Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah).....	37
Tabel 4. 4 Rincian dalam akun Aset Kontrak PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)	38
Tabel 4. 5 Pos Pendapatan pada Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)	38
Tabel 4. 6 Pos – pos dalam Laporan Posisi Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah).....	39
Tabel 4. 7 Rincian dalam akun Aset Kontrak PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah)	40
Tabel 4. 8 Pos Pendapatan pada Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah)	40
Tabel 4. 9 Perbandingan Komponen Pendapatan dalam pos-pos Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2020.....	47
Tabel 4. 10 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021 (dalam Miliaran Rupiah).....	48
Tabel 4. 11 Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah).....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi secara umum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organisasi yang bersifat *profit* atau mencari laba yang bertujuan utama untuk menghasilkan laba maksimal dan organisasi yang bersifat *non profit* bertujuan utama bukan sekedar mencari laba saja tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa yang diberikan. Salah satu perusahaan yang juga menghasilkan laba dari pengoperasian perusahaannya adalah perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Di dalam setiap organisasi yang bertujuan utama mencari laba, secara terus menerus akan mengeluarkan sejumlah laporan keuangan yang mengikhtisarkan operasinya untuk waktu tertentu dan rincian dari posisi harta dan hutang organisasi pada saat tertentu.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan atau suatu organisasi maka pihak luar yang memiliki keperluan bisa dengan mudah melihat posisi keuangan dan prestasi kerja yang telah dicapai perusahaan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Sebagian besar pemakai laporan keuangan menganggap laba bersih sangat berguna. Salah satu penyusun terpenting dari komponen-komponen laba adalah pendapatan. Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pada dasarnya pendapatan merupakan kenaikan laba, seperti laba pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang dan atau jasa oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 mengenai Pendapatan, PSAK 34 mengenai Kontrak Konstruksi, PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*, ISAK 10 mengenai Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian Konstruksi *Real Estate*, dan ISAK 27 mengenai Pengalihan Aset dari Pelanggan. PSAK 72 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK ini diperbolehkan. Sektor yang akan terkena efek dari perubahan standar ini salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penelitian lain menambahkan bahwa menurut International Accounting Standards Board (IASB) pergantian standar ini akan memberikan dampak yang cukup besar terutama pada perusahaan yang transaksinya berupa kontrak jangka panjang atau produk gabungan yang biasanya ada pada perusahaan real estat dan telekomunikasi.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia (2020) Sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang masih memiliki daya tahan (*resiliencie*) di tengah pandemi Covid-19. Kebutuhan masyarakat akan gaya hidup digital dengan akses data internet selama pandemi Covid-19 turut mengerek kinerja emiten telekomunikasi. Turina Farouk, SVP-Head of Corporate Communications PT Indosat Tbk (ISAT) menyatakan bahwa selama kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Indosat mencatatkan kenaikan traffic data hingga 27% di seluruh regional, termasuk Jabodetabek. Tren ini diperkirakan masih akan terus berlanjut kendati pemerintah sudah mulai menerapkan PSBB transisi. Sementara itu, Telkomsel, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga mencatatkan kenaikan traffic data hingga 22,8% di tengah pandemi Covid-19. Penggunaan aplikasi berbasis pertemuan virtual dan layanan video streaming melonjak masing-masing 75% dan 13,8%.

Dalam Pelaporannya PT Telekomunikasi sudah mulai menerapkan PSAK 72 per 1 Januari 2020. Dalam penerapannya, PT. Telekomunikasi Indonesia mengalami kendala dalam mereview ribuan kontrak karena harus mengenali semua kontrak yang ada sebelum mengakuinya sebagai pendapatan karena banyaknya persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan (www.indotelko.com). PSAK 72 memiliki dampak besar karena menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar, korporasi harus mengenali semua kontrak dengan pelanggan yang mereka miliki sebelum bisa mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak tersebut, sebab PSAK menentukan persyaratan khusus sebelum bisa melakukan pengakuan pendapatan. Berikut ketentuan standar laporan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk :

Tabel 1. 1 Penerapan PSAK tentang Pendapatan/Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

No	Keterangan	Sebelum 2020	Sesudah 2020
1	Standar yang berlaku	PSAK 23	PSAK 72
2	Tahun Terbit	2009	2017
3	Tanggal efektif	1 Januari 2011	1 Januari 2020
4	Status	Masih memakai PSAK 23	Menggantikan PSAK 23
5	Kebijakan Akuntansi Pendapatan	Non Kontrak	Berdasarkan Kontrak

Berdasarkan Tabel diatas, Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di tahun sebelum 2020 masih memakai standar yang berlaku yaitu PSAK 23, namun sesudah 2020 perusahaan menerapkan dini PSAK 72 yang mulai efektif per 1 januari 2020 dan merubah kebijakan akuntansi pendapatan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut Penyajian/Penerapan PSAK 72 (2017) pada laporan keuangan PT Telekomunikasi sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72 (2017) :

Tabel 1. 2 Penyajian/Penerapan PSAK 72 (2017) pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

A. Pos-pos Laporan Posisi Keuangan	Sebelum PSAK 72	Sesudah PSAK 72	Dampak Penyesuaian (dalam miliaran Rupiah)
- Aset Lancar	Piutang Usaha	Aset Kontrak	1.066
	-	Biaya Kontrak	454
- Liabilitas Jangka Pendek	Pendapatan diterima dimuka – Jangka Pendek	Liabilitas Kontrak	1.044
- Liabilitas Jangka Panjang	Pendapatan diterima dimuka – Jangka Panjang	Liabilitas Kontrak	7.834
B. Pos-pos Laporan Laba Rugi			
Pendapatan :	Komponen Pendapatan berdasarkan Produk	Komponen pendapatan Berdasarkan <i>costumer</i>	-

Sumber : idx.co.id. Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, hasil perbandingan laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan sesudah penerapan standar PSAK terbaru ditemukan adanya implikasi yang material dari penerapan PSAK terbaru yaitu aset mengalami penyesuaian sebesar Rp1,066 triliun, Biaya Kontrak sebesar Rp454 miliar kemudian jumlah liabilitas sebesar Rp8,834 triliun. Didalam Laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, terjadinya perbedaan komponen pendapatan pada saat sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72. Pada saat sebelum penerapan PSAK 72 Pendapatan yang diakui berdasarkan produk sedangkan sesudah menerapka PSAK 72 Pendapatan berdasarkan *costumer*.

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, perusahaan tidak merasa kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam melakukan proses penyajian laporan keuangan harus dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Keuangan agar mendapatkan informasi yang akurat. Pendapatan yang maksimal sangat diperlukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan terus menerus. Pada umumnya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan praktik akuntansi pendapatan sesuai dengan PSAK. Perlakuan akuntansi yang tepat atas pendapatan dapat dikatakan penting, sebab di dalam kegiatan ini dilakukan berbagai macam proses akuntansi mulai dari pencatatan penerimaan sehingga keluaran (output) yang berupa laporan keuangan. Hal ini sangat penting dikarenakan pendapatan ini berhubungan langsung dengan segala kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang baik sangat diperlukan untuk memperlancar berbagai kegiatan operasi yang ada di perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Hanifah Shabirah (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan PSAK 72 terhadap nilai perusahaan dengan hasil analisis menunjukkan penerapan PSAK 72 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Veronica, dkk (2019) dengan judul Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang terdaftar di BEI Tahun 2018 dengan hasil analisis menunjukkan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jika dibanding dengan menggunakan standar sebelumnya. Penelitian Dias P Febriani (2020) dengan judul Dampak Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat dengan hasil analisis menunjukkan pendapatan yang diakui dan dicatat berdasarkan PSAK 72 lebih rendah dibandingkan PSAK 23. Penelitian Duwi Rahayu, dkk (2021) dengan judul Dampak Implementasi PSAK 72 terhadap kinerja keuangan di Era Pandemi Covid-19 dengan hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi pendapatan perusahaan. Penelitian Fitria Anggraini (2021) dengan judul Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK No 72 Pada Penjualan Ekspor Udang PT Madsumaya Indo Seafood dengan hasil analisis menunjukkan pengakuan pendapatan pada PT Madsumaya Indo Seafood adalah belum sejalan dengan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 pada penjualan ekspor udang dengan pembayaran tanpa *letter of credit*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 72 Tahun 2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, perusahaan tidak merasa kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Akan tetapi, di tahun 2020 terjadinya perubahan standar baru yaitu pergantian PSAK 23 ke PSAK 72. Di dalam penerapannya perusahaan mengalami kendala dalam mereview ribuan kontrak karena harus mengenali semua kontrak yang ada sebelum mengakuinya sebagai pendapatan karena banyaknya persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 72 dalam pendapatan. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ditemukan adanya implikasi yang material dari penerapan PSAK 72 ini. Dalam melakukan proses pengakuan pendapatan harus dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Keuangan agar mendapatkan informasi yang akurat.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ditunjukkan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebelum menerapkan PSAK 72 (2017)?
2. Bagaimanakah laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk setelah menerapkan PSAK 72 (2017)?
3. Bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (PSAK 72 Tahun 2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2021” Selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan di bangku kuliah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebelum menerapkan PSAK 72 (2017)
2. Untuk mengetahui laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk periode setelah menerapkan PSAK 72 (2017)
3. Untuk mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak diantaranya adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengakuan pendapatan pada suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi (khususnya akuntansi keuangan) sebagai acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi, serta kepada pihak akademik yang mengetahui lebih lanjut mengenai pengakuan pendapatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Menurut Suteja (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu dan digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Werner R. Murhadi (2018) laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan PSAK 1 (2018) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan merupakan gambaran dari hasil suatu proses akuntansi pada periode tertentu dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.2 Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan

Berdasarkan PSAK dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, Tujuan Pelaporan keuangan secara umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrument ekuitas dan instrument hutang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Beberapa karakteristik dalam Pelaporan keuangan yaitu :

a. Karakteristik Kualitatif Fundamental

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi

tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) dimasa depan. Informasi keuangan dengan nilai prediktif digunakan oleh pengguna untuk membuat prediksi. Informasi keuangan dengan nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik yang harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Penjabaran lengkap yaitu mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendiskripsikan fenomena. dalam hal ini, bebas dari kesalahan tidak berarti akurat secara sempurna dalam segala hal. Representasi tepat dengan sendirinya tidak selalu menghasilkan informasi yang berguna.

b. Karakteristik Kualitatif Peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam menemukan mana diantara dua acara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap sama-sama relevan dan dipresentasikan dengan tepat. Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman adalah karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan dengan tepat.

2.2 Prinsip Pendapatan Berdasarkan PSAK

PSAK merupakan suatu kerangka prosedur rujukan yang menunjang pembuatan laporan keuangan. PSAK berisi bermacam-macam aturan yang berhubungan dengan aktivitas pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, serta penyajian sebuah laporan.

Terdapat berbagai prinsip dan dasar penyajian laporan yang berisi tujuan umum (*general purpose financial statements*) di dalam PSAK. Dasar-dasar tersebut ditetapkan supaya seorang akuntan dapat lebih mudah membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Umumnya, data entitas yang disajikan PSAK adalah ekuitas, pendapatan, aset, beban, dan liabilitas. Adapun entitas lain, seperti arus kas, laba atau rugi, serta kontribusi dan distribusi dari pemilik usaha.

PSAK diciptakan sekaligus disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Organisasi ini membuat PSAK berdasarkan situasi dan kondisi yang tengah berlangsung. Berbagai lembaga dan institut resmi dalam negeri telah menyetujui dan mengesahkan PSAK. Maka dari itu, orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi harus mengikuti pedoman tersebut.

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalty, dan sewa.

2.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 (PSAK 23)

Pernyataan Standar 23 ini mengatur tentang pendapatan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 23 tahun 1994. Tanggal efektif pernyataan ini berlaku untuk periode tahun buku yg dimulai per 1 Januari 2011.

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

Pada transaksi penjualan barang, pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- a) Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
- b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d) Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut.
- e) Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

b. Penjualan jasa

Menyangkut pelaksanaan tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

- b) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas.
 - c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
 - d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- c. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan pendapatan seperti bunga, Royalti, dan Deviden.
- a) Bunga yaitu pembebanan untuk menggunakan kas atau setara dengan kas atau jumlah terutang kepada entitas. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif.
 - b) Royalty yaitu untuk menggunakan asset jangka panjang entitas, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan piranti lunak computer. Pendapatan dari royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
 - c) Deviden yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Pendapatan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui jika :

- a) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas.
- b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Pernyataan ini tidak mengatur tentang pendapatan yang timbul dari:

1. Perjanjian sewa
2. Dividen yang timbul dari investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
3. Kontrak asuransi
4. Perubahan nilai wajar dari asset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya
5. Perubahan nilai aset lancar lain

2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 (PSAK 72)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah mengesahkan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2017. Salah satu PSAK baru tersebut adalah PSAK 72. PSAK 72 mengatur Kontrak dengan Pelanggan yang merupakan adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 15 yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. Definisi Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat

dipaksakan. Bentuk kontrak itu bisa berupa lisan, tulisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas (Paragraf 10). PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi *Real Estate*, serta ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*. Tujuan PSAK 72 ini adalah untuk menetapkan prinsip di mana perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai pendapatan dan arus kas dalam hal sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastiannya. Di dalam PSAK 72 pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang berasal dari aktivitas normal suatu perusahaan. PSAK 72 memiliki poin penting yakni pengakuan pendapatannya hanya dapat dilakukan setelah terjadinya serah terima dan memenuhi lima kriteria yang telah diatur dalam standar akuntansi. Prinsip utama pengakuan pendapatan tersebut terdiri dari lima tahapan, yaitu Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, Menentukan harga transaksi, Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

PSAK 72 merupakan terobosan besar dalam pengaturan akuntansi untuk pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (Investasi, 2019). Ada lima tahapan dalam pengakuan pendapatan, yaitu :

Tabel 2. 1 Tahapan Pengakuan Pendapatan

No	Langkah - Langkah	Tahapan Akuntansi
1	Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan	Pengakuan pada saat mengidentifikasi kontrak dan kewajiban
2	Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan	
3	Menentukan harga transaksi	Pengukuran transaksi yang relevan dengan pendapatan (termasuk analisis kontrak pelanggan)
4	Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan	
5	Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan	Pengakuan pendapatan

Berdasarkan tabel diatas, pengakuan pendapatan terjadi pada saat mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi kewajiban

pelaksanaan. Pendapatan diukur pada saat menentukan harga transaksi dan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan.

2.2.3 Identifikasi Kontrak

Pada saat mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan (Paragraf 09) Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi :

- a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing
- b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan
- c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan
- d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak)
- e. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

Tidak akan terdapat kontrak jika setiap pihak didalam kontrak memiliki hak yang dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Kontrak tidak terlaksana penuh jika entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan entitas belum menerima, dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Jika kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi :

- a. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial. Imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan
- b. Kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Didalam Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan, terdapat beberapa jenis identifikasi yaitu :

- a. Kombinasi Kontrak yaitu, entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria tersebut terpenuhi :
 - a) Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal
 - b) Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain

- c) Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang/jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal
- b. Modifikasi Kontrak yaitu, Perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Persetujuan modifikasi kontrak dalam tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Perusahaan mencatat sebagai kontrak baru (kontrak terpisah) jika dua kondisi ini terpenuhi :
 - a) Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Contoh : Perusahaan menjual barang atau jasa secara terpisah dan tidak saling ketergantungan antara barang dan jasanya
 - b) Harga kontrak meningkat karena sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian terhadap harga yang mencerminkan kontrak tertentu.

Perusahaan mencatat sebagai modifikasi kontrak dengan pilihan cara berikut ini :

- a) Penghentian kontrak yang ada dan mengakui kontrak yang baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dengan barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Jumlah imbalan yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan yakni imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan ditambah imbalan yang dijanjikan sebagai bagian dari modifikasi
- b) Dicatat sebagai bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan, oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak.
- c) Jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari beberapa item, maka entitas mencatat dampak modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak terpenuhi (termasuk yang tidak terpenuhi secara sebagian) dalam kontrak modifikasi

2.2.4 Menentukan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Faktor – faktor yang harus dipertimbangkan adalah :

- a. Imbalan Variabel, yaitu jumlah imbalan dapat bervariasi karena diskon, rabat pengembalian dana, kredit, konsesi harga, insentif, bonus kerja, denda, atau item lainnya yang serupa
- b. Estimasi pembatas imbalan variabel, Entitas hanya mengakui jika entitas memiliki pengalaman kontrak yang serupa dan dapat mengestimasi jumlah kumulatif pendapatan dan juga berdasarkan pengalaman, pembalikan

signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi,

- c. Keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak
- d. Imbalan nonkas, imbalan ini dapat berbentuk barang, jasa, atau Imbalan nonkas lainnya.
- e. Utang imbalan kepada pelanggan, mencakup jumlah kas yang dibayarkan oleh entitas, kredit atau item barang lainnya, contoh lainnya : diskon, rabat, kupon, produk/jasa gratis.

2.2.5 Aset Kontrak

Aset kontrak merupakan hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang telah dialihkan entitas kepada pelanggan ketika hak tersebut bergantung selain berjalannya waktu. (sebagai contoh, pelaksanaan masa depan entitas (Lampiran A).

2.2.6 Biaya Kontrak

Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh (sebagai contoh, komisi penjualan). (Paragraf 91-92).

2.2.7 Liabilitas Kontrak

Kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dimana entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan (Lampiran A).

2.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian terhadap laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi yang dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realita ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Menurut PSAK 25 (2018) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi yang relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah

mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam rapatnya pada tanggal 23 November 2016 telah mengesahkan Exposure Draft (ED) PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. ED PSAK 72 diadopsi dari IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board. DSAK IAI mengusulkan 1 Januari 2019 sebagai tanggal efektif dan penerapan dini diperbolehkan. maka DSAK IAI memutuskan untuk memberikan kelonggaran tanggal efektif PSAK 72 selama 1 (satu) tahun menjadi 1 Januari 2020. Oleh karena itu, kelonggaran tanggal efektif tersebut diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih panjang kepada industri untuk dapat mempersiapkan diri sejak dini dalam membuat analisis dampak penerapan PSAK 72 terhadap laporan keuangannya.

2.3.1 Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Tujuan Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi yaitu akan meningkatkan manfaat laporan keuangan sebagai sumber informasi utama perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis

Menurut PSAK 25 (2018) Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos – pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

2.3.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan dari satu prinsip akuntansi ke prinsip akuntansi yang lain. Menurut PSAK 25 entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut :

- a) Disyaratkan oleh suatu PSAK
- b) Menghasilkan suatu laporan keuangan yang memberikan suatu informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

Pengguna laporan keuangan perlu untuk mampu membandingkan laporan keuangan entitas dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dan dari suatu periode dengan periode berikutnya, kecuali suatu perubahan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria diatas. Berikut ini yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi :

- a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya
- b) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material.

2.3.3 Pengakuan Atas Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dalam penyajiannya, terdapat dua Penerapan dalam perubahan kebijakan akuntansi yaitu penerapan Retrospektif dan penerapan Prospektif. Penerapan Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penerapan Prospektif merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:

1. Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut; dan
2. Pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.

Dalam masa transisi ini pengakuan atas penerapan perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara Retrospektif. Dalam perubahan kebijakan akuntansi PSAK 23 ke PSAK 72 ini tidak mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tetapi pengakuannya mengakibatkan reklasifikasi laporan keuangan. Reklasifikasi merupakan perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

2.3.3.1 Pengakuan dan Pengukuran didalam PSAK 23

Pengakuan pendapatan merupakan kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Didalam PSAK 23 Pendapatan diakui berdasarkan jenis-jenis transaksinya.

Pengukuran pendapatan merupakan berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Adapun penjelasannya lebih lanjut dari pernyataan tersebut yang dikemukakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) adalah Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat yang diperbolehkan oleh entitas.

didalam PSAK 23 yaitu pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

2.3.3.2 Pengakuan dan Pengukuran didalam PSAK 72

Didalam PSAK 72 (2017), Pendapatan diakui ketika (atau selama) perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Didalam PSAK 72, Terdapat 5 tahapan pengakuan pendapatan, yaitu :

- a. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
- c. Menentukan harga transaksi
- d. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
- e. Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Dalam mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya, ada dua waktu yaitu :

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu jika salah satu kriteria berikut terpenuhi :
 - a) Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut.
 - b) Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan.
 - c) Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu

Pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan diukur pada saat menentukan harga transaksi dan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Pengukuran terbaik yakni menggunakan nilai wajar yaitu harga jual berdiri sendiri. Namun jika tidak tersedia, entitas menggunakan estimasi terbaik dalam mengukur barang/jasa.

2.3.3.3 Penerapan pada Penyajian Laporan Keuangan

Didalam PSAK 25, Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan :

- a) Judul PSAK
- b) Bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya, ketika dapat diterapkan
- c) Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi
- d) Penjelasan ketentuan transisi, ketika dapat diterapkan
- e) Ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang
- f) Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya sajian, sepanjang praktis, jumlah penyesuaiannya untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh.
- g) Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan.

Didalam PSAK 72, Penyajian didalam laporan keuangannya yaitu :

- a) Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan
- b) Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang
- c) Entitas menyajikan kontrak sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian terhadap PSAK 72, yaitu :

Tabel 2. 2 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Shabirah, (2018) Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Lq-45 Tahun 2018)	PSAK 72 dan Nilai Perusahaan	Ukuran perusahaan dan profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk mendukung hubungan penerapan PSAK 72 terhadap nilai perusahaan.	Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 72 meningkatkan nilai perusahaan.
2.	Veronica et al, (2019) Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018	PSAK 72	Perbandingan Laporan laba rugi PSAK 72 dengan PSAK 44	teknik analisis deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel <i>non probability purposive sampling</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jika dibanding dengan menggunakan standar sebelumnya. Pengaturan pada PSAK 72 membuat pendapatan dari kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tidak dapat diakui pada tahun 2018. Oleh karena itu, nilai pendapatan tahun 2018 pada masing-masing perusahaan menjadi lebih kecil jika dibanding nilai pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 44.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Febriani et al, (2020) Dampak Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Real Estat	PSAK 72	Perbandingan pendapatan dalam pos laporan laba rugi	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>comparative method</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diakui dan dicatat berdasarkan PSAK 72 lebih rendah dibandingkan PSAK 23.
4.	Almayda, dkk (2020) Analisis Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado	PSAK 72	Perbandingan Laporan posisi keuangan sebelumnya dengan standar terbaru	metode deskriptif . diperoleh dari hasil wawancara dan data yang dikumpulkan dari perusahaan.	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengakuan Pendapatan pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado belum sesuai dengan PSAK 72.
5.	Puspamurti et al, (2020) Penerapan PSAK 72 Terkait Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Laporan keuangan Perusahaan	Perbandingan Laporan posisi keuangan sebelumnya dengan standar terbaru	metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, content analysis, dan wawancara.	bahwa penerapan PSAK 72 (2017) oleh PT Telkom Tbk berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 dan bukan merupakan penerapan secara dini di Indonesia karena pada tahun 2018 dan 2019 PT Telkom menggunakan PSAK 23(2014). Pengimplementasian IFRS 15 (2014) oleh PT Telkom sejak tahun 2018 tidak membuat pelaporan keuangannya yang disampaikan kepada BEI mengadopsi PSAK 72 (2017) secara dini. PT Telkom telah melakukan persiapan diri berkaitan dengan implementasi PSAK 72 (2017) sejak akhir tahun 2016.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Rahayu et al, (2021) Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Di Era Pandemi Covid-19	PSAK 72 dan Kinerja keuangan	Kinerja keuangan	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan real estate.	Hasil Penelitian yaitu implementasi PSAK 72 menunjukkan pengaruh signifikan (negatif), akan tetapi perusahaan telah melakukan upaya persiapan implementasi PSAK 72 ditahun 2019 dengan menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawannya dan evaluasi sebelum akhirnya mengimplementasikan PSAK 72. Artinya implementasi 72 tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi pendapatan perusahaan, Hal itu dikarenakan implementasi PSAK 72 bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan.
7.	Anggraini, (2021) Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 72 Pada Penjualan Ekspor Udang Pt. Madsumaya Indo Seafood	PSAK 72	Laporan Laba Rugi	Metode peneliti yakni metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan pada PT Madsumaya Indo Seafood adalah belum sejalan dengan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 pada penjualan ekspor udang dengan pembayaran tanpa <i>letter of credit</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8.	Yuli P, dkk (2021) Analisis Akuntansi Pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Nexusted cahaya lestari	PSAK 72	Laporan laba rugi dan Laporan Neraca	Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian adalah data keuangan PT. Nexusled Cahaya Lestari.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penerapan pendapatan di perusahaan sebagian penerapannya mengakui sesuai dengan konsep acrual basic namun sebagian belum sepenuhnya dimana pada saat terjadinya transaksi digunakan <i>cash basic</i> , Pendapatan perusahaan bersumber dari pendapatan operasional yakni pendapatan atas penjualan barang dan jasa dan Penerapan pengakuan pendapatan PT. Nexusled Cahaya Lestari belum efisien sebagai pendapatan PT. Nexusled Cahaya Lestari berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 72 dalam mencatat laporan laba Rugi.

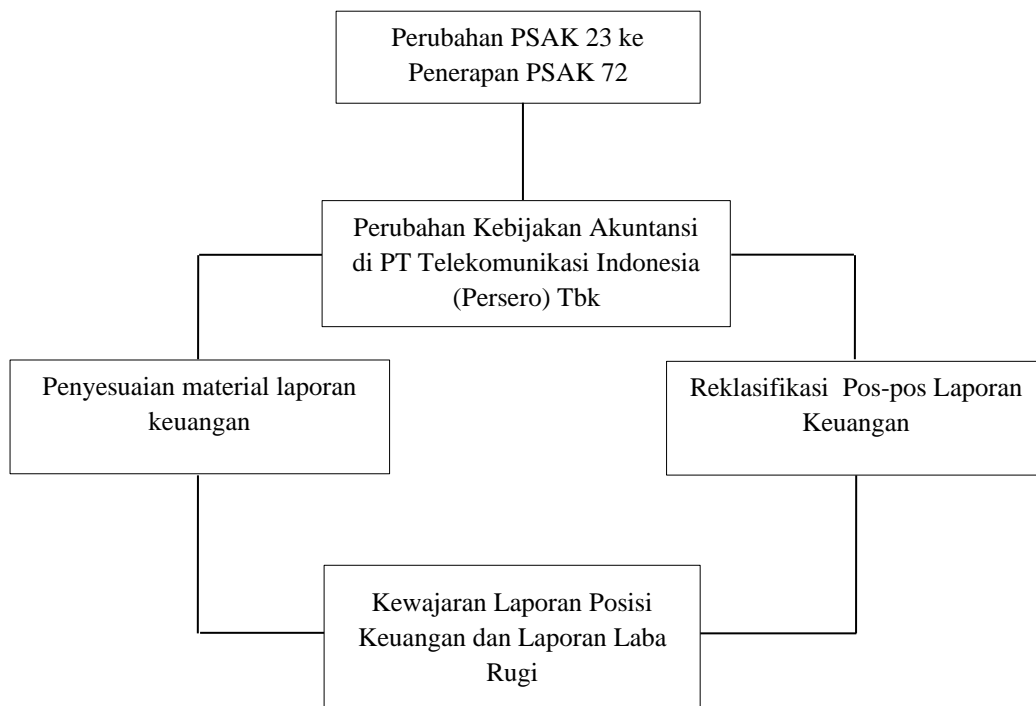
No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Ayu Rifatul (2021), Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi di Masa Pandemi COVID-19	Independen : Penerapan PSAK 72 dalam Pengakuan Pendapatan Dependen : Kinerja Keuangan	Rasio Keuangan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien sebesar 0,316 (Positif) dan nilai signifikansi (Sig) 0,028 lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 72 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PSAK 72 diterapkan pada perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut, terutama dari sisi pendapatan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan sudah menunjukkan keterbukaan kebijakan implementasi PSAK 72, sehingga terdapat sinergi positif antara shareholder dengan perusahaan di masa pandemi covid-19.
10	NurAfifah (2023), Pengaruh penerapan psak 72 terhadap kinerja keuangan subsektor industri konstruksi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022	Independen : Penerapan PSAK 72 dalam Pengakuan Pendapatan Dependen : Kinerja Keuangan	Rasio Keuangan	analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, uji parsial, dan uji koefisien determinasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak memiliki pengaruh terhadap masing-masing kinerja keuangan yang diproksi menggunakan current ratio, total asset turn over, debt to asset ratio, return on equity, dan price per earning.

2.4.2 Kerangka Pemikiran

PSAK merupakan suatu kerangka prosedur rujukan yang menunjang pembuatan laporan keuangan. PSAK berisi bermacam-macam aturan yang berhubungan dengan aktivitas pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, serta penyajian sebuah laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan, maka pihak luar yang memiliki keperluan bisa dengan mudah melihat posisi keuangan dan prestasi kerja yang telah dicapai perusahaan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang baik agar perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sehingga penting sekali perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Saat sebuah laporan keuangan menganut pada PSAK, akuntan akan lebih mudah untuk menganalisis perubahan yang terjadi di dalam perusahaan.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang terkena efek dari perubahan standar. Pergantian standar ini yang akan memberikan dampak yang cukup besar terutama pada perusahaan yang transaksinya berupa kontrak jangka panjang atau produk gabungan.

Pada Tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Pernyataan ini menggantikan Standar sebelumnya salah satunya itu PSAK 23 tentang pendapatan. PSAK 72 ini berlaku efektif pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK ini diperbolehkan. Sektor yang akan terkena efek dari perubahan ini salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Dengan adanya perubahan PSAK ini menarik bagi penulis untuk mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. Standar khusus yang baru diterapkan ini menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan sudah menerapkannya; sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, adanya perubahan standar PSAK 23 ke penerapan PSAK 72 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sehingga terjadinya perubahan kebijakan akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perubahan penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya penyesuaian material pada laporan keuangan dan juga reklasifikasi pada pos-pos laporan keuangan sehingga adanya kewajaran pada laporan posisi keuangna dan laporan laba rugi perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *eksploratif*. Deskriptif *eksploratif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Didalam metode penelitian ini, studi kasus mengenai analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 (2017) pada Pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode analisis non statistik.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PSAK 72 (2017) mengenai pendapatan dari kontrak pelanggan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut pada perusahaan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Organization* yang berupa suatu organisasi perusahaan unit analisisnya merupakan data keuangan yang terdapat pada lokasi penelitian selama tahun 2019-2021 dengan menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat variabel penelitian dianalisis seperti organisasi, perusahaan, instansi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditempatkan di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Industri, Tarikolot, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

3.3 Jenis – jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data. Peneliti mendapatkan data dan informasi diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan situs web resmi perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran
Penerapan pada PSAK 23	- Pengakuan	Ketetapan dalam mengakui pos-pos dalam laporan keuangan	Pendapatan diakui jika entitas sudah mentransfer seluruh risiko atas barang kepada pembeli atas penjualan barang dan entitas tidak lagi memiliki pengendalian efektif atas barang tersebut.
	- Penyajian	Kebenaran dan ketetapan dalam menyajikan laporan keuangan	Penyajian laporan keuangan disajikan secara sistematis.
Penerapan pada PSAK 72	- Pengakuan	Ketepatan dalam mengakui pos-pos dalam laporan keuangan	- Pendapatan tidak boleh diakui hingga terjadinya kontrak - Perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga kedua belah pihak dalam kontrak tersebut melakukan hak/kewajibannya
	- Penyajian	Kebenaran dan ketetapan dalam menyajikan laporan keuangan	- Dilakukannya penyesuaian dalam penyajian laporan keuangan berupa reklasifikasi

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini tidak melakukan metode penarikan sampel. Meskipun tidak menggunakan metode penarikan sample, Penulis tetap mengambil data yang memadai yaitu data Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk periode 2019-2021 yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan dibahas.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. Data sekunder yang di peroleh dari homepage Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan dilakukan untuk mengakses dan mengunduh laporan keuangan perusahaan Telekomunikasi yang telah dipublikasikan selama periode penelitian tahun 2019-2020. Data tersebut dimaksud agar dapat mendukung informasi menjadi lebih akurat dan lengkap.

Moleong (2007:217) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif dokumen sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Kegunaan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Sumber yang stabil, kaya, dan mendorong pencarian data lain.
2. Bukti untuk suatu penguji.
3. Sifatnya alamiah sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.
4. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status objek penelitian yang berhubungan dengan proses secara rinci dari keseluruhan personalia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis yang tidak membutuhkan perumusan hipotesis (Indrianto dan Supomo, 2009 dalam Adita dan Kiswara, 2012). Tahap dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan (Laporan keuangan PT Telekomunikasi Tbk periode 2019-2021)
2. Mengidentifikasi data bagaimana perlakuan akuntansi dalam pengakuan pendapatan perusahaan dengan meninjau lebih lanjut terhadap PSAK 72
3. Mencatat data yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis dengan metode analisis non statistik atau *Content analysis*. *Content analysis* adalah menganalisis terhadap isi dari suatu dokumen untuk mengidentifikasi karakteristik atau informasi spesifik pada dokumen, sehingga menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis (Indrianto dan Supomo, 2009 dalam Adita dan Kiswara, 2012). Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perlakuan akuntansi pendapatan pada perusahaan telekomunikasi. Data yang dibutuhkan dalam melakukan *content analysis* adalah laporan tahunan perusahaan khususnya laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2021.
4. Setelah data dianalisis maka penulis membuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan apakah pengakuan pendapatan pada perusahaan telah sesuai dengan PSAK 72 (2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan Dan Kegiatan Usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.

Dalam upaya bertransformasi menjadi *digital telecommunication company*, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (*customer-oriented*). Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih *lean* (ramping) dan *agile* (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan *customer experience* yang berkualitas. Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melingkupi *legacy* yang sudah ada sebelumnya.

Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 Digital Business Domain:

1. Digital Connectivity: Fiber to the x (FTTx), 5G, Software Defined Networking (SDN)/ Network Function Virtualization (NFV)/ Satellite
2. Digital Platform: Data Center, Cloud, Internet of Things (IoT), Big Data/ Artificial Intelligence (AI), Cybersecurity
3. Digital Services: Enterprise, Consumer

Sebagai Perusahaan terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia resmi tercatat di BEI pada 14 November 1995. Telkom Indonesia secara resmi menjual sahamnya ke publik pada 14 November 1995 dengan harga Rp. 2.050 per lembarnya. Berikut ini daftar anak – anak perusahaan Telkom Indonesia :

Tabel 3. 2 Daftar Anak Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

No	Anak Perusahaan Telkom	Kegiatan Bisnis
1	PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Operator seluler yang menyediakan jasa telekomunikasi seluler dan penyelenggaraan telekomunikasi seluler
2	PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)	Perusahaan investasi dan <i>sub-holding</i> yang berekspansi ke berbagai layanan digital dan industry ICT
3	PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat)	Perusahaan penyedia infrastruktur jaringan komunikasi satelit yang memberikan layanan jaringan satelit untuk data dan internet
4	PT PINS Indonesia	Menjalankan bisnis integrasi perangkat, jaringan, sistem, proses dan <i>internet of things (IoT)</i>
5	PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin)	Perusahaan yang bergerak pada jasa penggelaran dan pengelolaan infrastruktur jaringan akses <i>fixed-broadband</i> .
6	PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin)	Operator telekomunikasi global yang menyediakan solusi layanan telekomunikasi dan IT di luar negeri.
7	PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)	Penyedia layanan infrastruktur Menara telekomunikasi (<i>tower provider</i>) yang berskala nasional
8	PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra)	Penyedia jasa layanan telekomunikasi (<i>managed service</i>) dan solusi infrastruktur domestic dan internasional
9	PT Metranet	Penyedia media dan konten digital terintegrasi dengan bisnis inti media <i>online</i> , <i>digital content</i> , dan <i>digital billing</i> .
10	PT Graha Sarana Duta (Telkom Property)	Penyedia jasa property dengan mengedepankan <i>leverage asset idle Telkom</i> .

Sumber : Lifepal.co.id, 2019

Visi dan Misi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

1. Purpose Perusahaan

Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan.

2. Visi Perusahaan

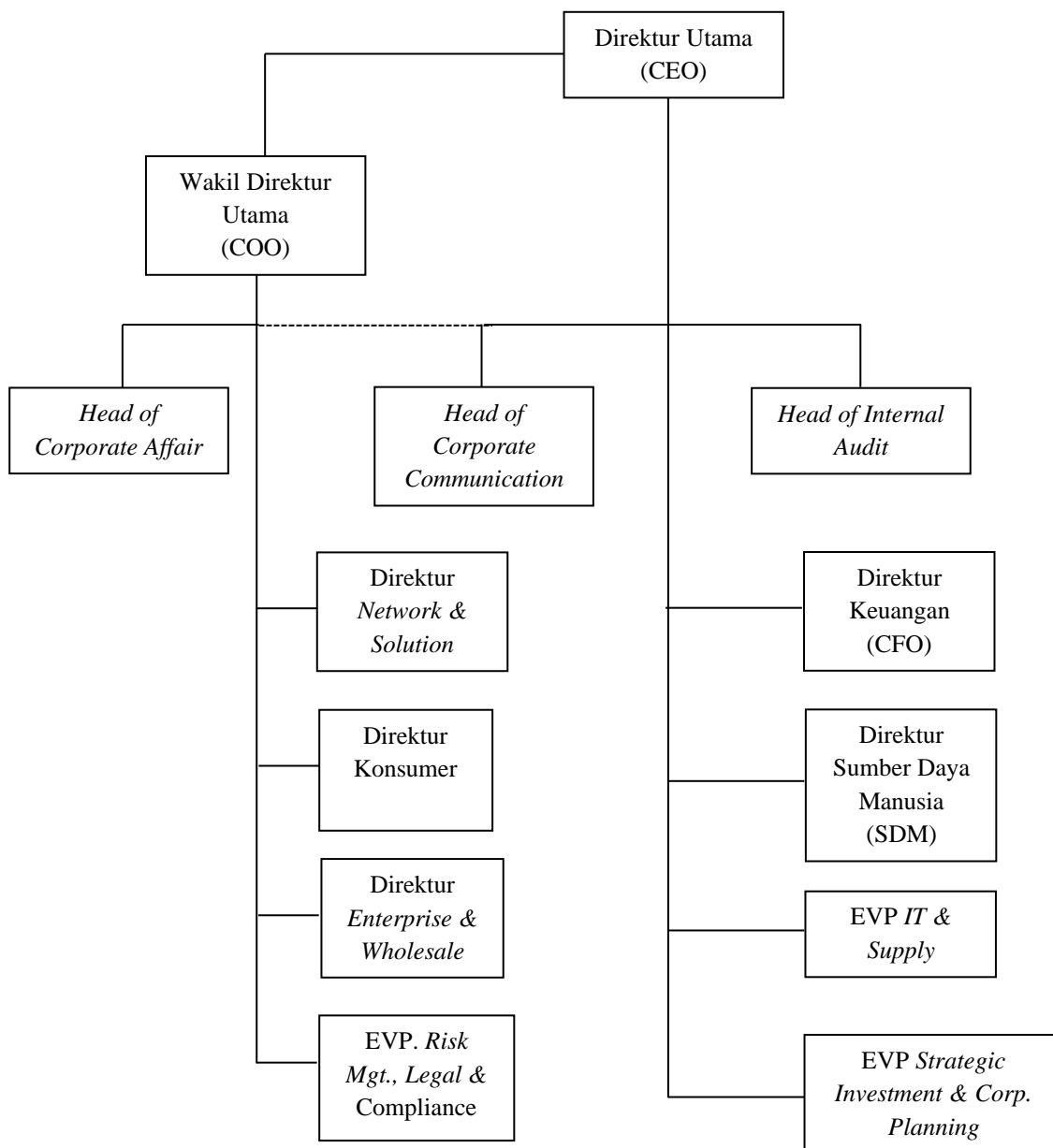
Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat

3. Misi Perusahaan

- a. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

- b. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa.
- c. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Uraian tugas organisasi di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

1. Direktur Utama (CEO) bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinir Direksi,
 - b. Mengendalikan langsung Direktur yang memimpin Direktorat pada *Corporate office* dalam penyelenggaraan operasional fungsinya, dan
 - c. Mengendalikan direktur yang memimpin Direktorat pada *Operating business*.
2. Wakil Direktur Utama (COO) bertugas untuk :

Membantu Direktur Utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi Direktorat-Direktorat yang berada dalam kelompok *Operating Business*, dan Fungsi *Corporate Support* yang berkaitan dengan *risk, legal, & compliance*, dan *corporate affair*
3. Direktur Keuangan (CFO) bertugas untuk :
 - a. Disamping tugasnya sebagai anggota Direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di Kantor Perusahaan dan seluruh unit bisnis, serta melakukan pengendalian penyelenggaraan aktivitas keuangan secara terpusat.
 - b. Guna penyelenggaraan aktivitas operasional keuangan secara terpusat, Direktur keuangan mengendalikan unit *Finance Center*, yaitu unit organisasi di luar organisasi *Corporate Office* yang diperankan sebagai pusat penyelenggara operasional keuangan.
4. Direktur Sumber Daya Manusia bertugas untuk :
 - a. Memberdayakan secara optimal seluruh SDM perusahaan guna merealisasikan strategi perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, serta mengendalikan penyelenggaraan operasional manajemen SDM secara terpusat.
 - b. Direktur SDM mengendalikan unit *Human Resource Center*, yaitu unit organisasi diluar organisasi *Corporate Office* yang diperankan sebagai pusat penyelenggara layanan operasional manajemen SDM di seluruh unit organisasi Telkom.
5. EVP IT & Supply bertugas untuk :
 - a. Memastikan terkendalinya pengelolaan logistik perusahaan, khususnya pengelolaan logistik yang mempersyaratkan pengelolaan secara terpusat dalam rangka pengendalian efisiensi dan menjaga tercapainya standar kualitas serta ketepatan *supply management* bagi proses pengelolaan bisnis.
 - b. Memastikan terselenggaranya proses yang terkait dengan identifikasi dan pengadministrasian aset perusahaan, serta terkendalinya pendayagunaan aset perusahaan.
 - c. Memastikan efektivitas pendayagunaan sistem informasi perusahaan, yang dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, serta mendukung

terciptanya keunggulan kompetitif bagi penyelenggaraan bisnis perusahaan.

6. EVP. Strategic Investment & Corporate Planning bertugas untuk :
 - a. Memastikan tersusunnya *strategic & business planning* untuk memberikan guideline yang memadai bagi upaya pencapaian tujuan korporasi, serta memastikan terealisasinya strategi perusahaan dalam mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan dengan upaya mendayagunakan sumberdaya perusahaan melalui pengembangan portofolio bisnis.
 - b. Dalam rangka mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan, EVP. Strategic Investment & Corporate Planning berperan mengendalikan pengelolaan portofolio bisnis pada unit-unit non organik dan upaya persiapan pembentukan subsidiary (perusahaan asosiasi/afiliasi).
7. Direktur Network & Solution bertugas untuk :
Di samping tugasnya sebagai anggota Direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan jasa, yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi.
8. Direktur Konsumer bertugas untuk :
Di samping tugasnya sebagai anggota Direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan fungsi *delivery channel* dan layanan Customer pada segmen retail/ konsumer, yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi.

4.2. Kondisi/Fakta/Pelaksana/Realisasi Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2020

4.2.1 Proses Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang berkaitan dengan PSAK 72 (2017)

Pada penerapan kebijakan baru pada tahun 2020, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mengatur bisnis dengan berbasis pada segmen pelanggan, atau *Customer Facing Unit (FCU)*. Dengan demikian, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mengategorikan produk yang dihasilkan menjadi :

1. Mobile

Produk ini menyediakan layanan *legacy* seluler termasuk *voice* dan SMS, *mobile broadband*, dan layanan *mobile digital* yang mencakup big data, layanan keuangan, VOD, Musik, permainan, dan iklan digital. Untuk mekanisme kontrak yang dijalankan layanan *mobile* menawarkan pascabayar dan prabayar. Perusahaan mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh perusahaan hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama.

2. *Consumer*

Produk ini menyediakan layanan *fixed voice, fixed broadband, IP-TV dan digital*. Untuk mekanisme kontrak yang dijalankan layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

3. *Enterprise*

Produk ini menyediakan layanan ICT dan *Platform* yang mencakup *konektivitas*, layanan TI, *data center* dan *cloud*, proses bisnis *outsourcing*, perangkat, bisnis satelit, layanan digital dan layanan yang berdekatan (seperti layanan *e-health, e- Payment*. Beberapa perjanjian dengan pelanggan ditawarkan sebagai produk bundle. Untuk pengaturan yang di bundel, Produk atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri.

4. *Wholesale and International Business Service (WIB)*

Produk ini menyediakan layanan *Wholesale Telecommunication Carrier, Bisnis Carrier, Bisnis international, bisnis tower/Menara telekomunikasi*, dan layanan infrastruktur dan manajemen jaringan.

4.2.2 Penerapan PSAK (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Sebelum dan Sesudah menerapkan PSAK 72 (2017)

Pada Tahun 2019, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk belum menerapkan PSAK 72. Berdasarkan PSAK, untuk penjualan barang, pendapatan diakui jika entitas sudah mentransfer seluruh risiko atas barang kepada pembeli atas penjualan barang dan entitas tidak lagi memiliki pengendalian efektif atas barang tersebut. Sedangkan untuk penjualan jasa, pendapatan diakui jika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.

Pada Tahun 2020, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. PSAK 72 ini bersifat *Principle Based*. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Pada tahun 2021, Perusahaan sudah menerapkan PSAK 72 secara utuh hal ini dibuktikan dengan adanya syarat dan ketentuan baru bahwa kontrak dengan

pelanggan adalah kontrak terbuka dengan minimal 12 bulan dan penalti terminasi dini yang substantif. Periode kontrak berdasarkan PSAK 72 selama 12 bulan dan selanjutnya kontrak bulanan.

4.2.3 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019

Berikut ini adalah Pos Aset dan Liabilitas dalam Laporan posisi keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 :

Tabel 4. 1 Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos – pos Laporan Posisi Keuangan	2019
Aset Lancar	
Piutang usaha	11.797
Liabilitas Jangka Pendek	
Pendapatan diterima dimuka – jangka pendek	7.352
Liabilitas Jangka Panjang	
Pendapatan diterima dimuka – jangka panjang	803

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi, diolah 2023

Berdasarkan data diatas, Pada tahun 2019 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk masih menggunakan kebijakan standar lama karena perusahaan masih mencatat transaksi piutang tanpa adanya syarat dan penerimaan pendapatan diterima dimuka dengan pelanggan. Perusahaan mencatat piutang usaha sebesar Rp11,797 Triliun. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek sebesar Rp 7,352 triliun dan Pendapatan diterima dimuka jangka panjang sebesar Rp 803 miliar.

Berikut merupakan rincian dari pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019 :

Tabel 4. 2 Pos Pendapatan dalam Laporan Laba Rugi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 (dalam Miliaran Rupiah)

Pendapatan berdasarkan Produk	2019
Pendapatan Telepon	
Telepon bergerak	25.090
Telepon tidak bergerak	2.888
Jumlah pendapatan Telepon	27.978
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	
Internet dan data seluler	55.675
Internet, Komunikasi dan jasa informatika	9.027
SMS	7.063

Pendapatan berdasarkan Produk	2019
Lain-lain	1.023
Jumlah Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	72.788
Pendapatan Jaringan	1.848
Pendapatan Indihome	18.325
Pendapatan Lainnya	
CPE dan terminal	1.732
Sewa Menara telekomunikasi	1.239
Penjualan peripheral	1.109
<i>Call center service</i>	800
E-payment	566
E-Health	523
Lain-lain	2.373
Jumlah pendapatan lainnya	8.342
Jumlah Komponen Pendapatan	135.567

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi, Diolah 2023

Berdasarkan komponen pendapatan diatas, pada tahun 2019 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk merincikan komponen pendapatan yang diterima berdasarkan produknya. Pendapatan telepon meliputi telepon bergerak dan telepon tidak bergerak dengan jumlah pendapatan telepon sebesar Rp27,978 triliun. Pendapatan jasa, internet, dan jasa teknologi informatika meliputi internet dan data seluler, internet, komunikasi, dan jasa informatika, *SMS*, dan lain-lain dengan jumlah pendapatan sebesar Rp72,788 triliun. Pendapatan jaringan sebesar Rp1.848 triliun, pendapatan indihome sebesar Rp18,325 triliun, Pendapatan lainnya seperti CPE & Terminal, sewa menara telekomunikasi, penjualan peripheral, *call center service*, E-Payment, E-Health, dan lain-lain dengan jumlah pendapatan lainnya Rp8,342 triliun. Jumlah total keseluruhan komponen pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp135,567 triliun.

4.2.4 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020

Berikut ini adalah Pos Aset dan Liabilitas dalam Laporan posisi keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020:

Tabel 4. 3 Pos – pos dalam Laporan Posisi Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan	2020
Aset	
Aset lancar	
Piutang usaha	11.339
Aset Kontrak	1.036
Biaya Kontrak	454
Aset Tidak lancar	
Aset Kontrak	203
Biaya Kontrak	1.254
Liabilitas jangka pendek	
Liabilitas Kontrak	7.834
Liabilitas jangka Panjang	
Liabilitas Kontrak	1.004

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk), Diolah 2023

Berdasarkan data diatas, Pada tahun 2020 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mencatat piutang usaha sebesar Rp11,399 triliun. Didalam pos – pos laporan posisi keuangan perusahaan tahun 2020, perusahaan sudah menerapkan standar kebijakan baru PSAK 72 yaitu perusahaan tercatat adanya kontrak yang belum terselesaikan sehingga adanya penambahan akun “Aset Kontrak” sebesar Rp1,036 triliun. “Biaya kontrak” sebesar Rp1,254 triliun. Pendapatan diterima dimuka direklasifikasi ke “Liabilitas Kontrak” dengan jumlah Rp8,838 triliun karena perusahaan akan mengalihkan kewajibannya kepada pelanggan dimana perusahaan telah menerima jumlah imbalan yang jatuh tempo dari pelanggan sehingga akun yang tercatat di liabilitas adalah liabilitas kontrak.

Tabel 4. 4 Rincian dalam akun Aset Kontrak PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)

Rincian Aset Kontrak	2020
Aset Kontrak	1.351
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(112)
Jumlah bersih	1.239
Jangka Pendek	(1.036)
Jangka Panjang	203

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk), Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) mencatat Aset Kontrak sebesar Rp1,351 Triliun, Penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp112 Triliun, Jangka pendek sebesar Rp1,036 Triliun dan jangka panjang sebesar Rp203 Triliun.

Berikut merupakan rincian dari komponen pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 :

Tabel 4. 5 Pos Pendapatan pada Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos Pendapatan	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Telepon	19.427	1.065	845	273	-	21.610
Pendapatan Interkoneksi	410	-	-	7.276	-	7.686
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	59.502	-	-	-	-	59.502
Internet, Komunikasi dan jasa informatika		10	8.069	1.665	-	9.744
SMS	4.377	-	440	-	-	4.817
Lain-lain	-	42	939	632	140	1.753
Pendapatan Jaringan	4	-	766	919	-	1.689
Pendapatan Indihome	-	19.827	2.387	-	-	22.214
Layanan Lainnya	-	51	4.277	464	378	5.170
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	83.720	20.995	17.723	11.229	518	136.462
Pendapatan dari transaksi <i>lessor</i>	-	-	-	2.227	-	2.227

Pos Pendapatan	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan Konsolidasian
Jumlah Pendapatan	83.720	20.995	17.723	13.506	518	136.462

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 PT Telekomunikasi mengelompokkan komponen pendapatan berdasarkan *Costumers*, yaitu *Mobile*, *Consumer*, *Enterprise*, *WIB*. Yang termasuk kedalam *Mobile* meliputi : Pendapatan telepon, pendapatan interkoneksi, Pendapatan internet dan data selular, *SMS*, dan Pendapatan jaringan dengan jumlah pendapatan *Mobile* sebesar Rp83,720 triliun, Pendapatan *Consumer* meliputi: Pendapatan telepon, Jasa teknologi informatika, Pendapatan indihome dengan jumlah pendapatan *Consumer* sebesar Rp20,995 triliun. Pendapatan *Interprise* meliputi : penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan pendapatan lainnya dengan jumlah pendapatan *Enterprise* sebesar Rp17,723 triliun. Pendapatan *WIB* terdiri dari jasa interkoneksi dan jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya dengan jumlah pendapatan *WIB* sebesar Rp13,506 triliun. Total pendapatan konsolidasian tercatat sebesar Rp136,462 triliun.

4.2.5 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021

Berikut ini adalah Pos Aset dan Liabilitas dalam Laporan posisi keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 :

Tabel 4. 6 Pos – pos dalam Laporan Posisi Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan	2021
Aset	
Aset Lancar	
Piutang Usaha	8.510
Aset Kontrak	2.330
Biaya Kontrak	656
Aset Tidak Lancar	
Aset Kontrak	143
Biaya Kontrak	1.608
Liabilitas Jangka Pendek	
Liabilitas Kontrak	6.795
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Kontrak	1.283

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, perusahaan sudah menerapkan PSAK 72 secara konsisten. Tercatat piutang usaha sebesar Rp8,510 triliun, didalam kelompok aset lancar Aset kontrak tercatat sebesar Rp 2,330 triliun, Biaya kontrak tercatat sebesar Rp 656 miliar. Didalam kelompok aset tidak lancar, Aset kontrak tercatat sebesar Rp 203 miliar dan Biaya Kontrak tercatat sebesar 1,254 triliun. Jumlah liabilitas kontrak jangka pendek dan jangka panjang tercatat sebesar Rp 23,965 triliun.

Tabel 4. 7 Rincian dalam akun Aset Kontrak PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah)

Rincian Aset Kontrak	2021
Aset Kontrak	2.588
Penyisihan kerugian kredit ekspetasian	(115)
Jumlah bersih	2.473
Jangka Pendek	(2.330)
Jangka Panjang	143

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 PT Telekomunikasi Indonesia Persero (Tbk) mencatat Aset Kontrak sebesar Rp2,588 Triliun, Penyisihan kerugian kredit ekspetasian sebesar Rp115 Triliun, Jangka pendek sebesar Rp2,330Triliun dan jangka panjang sebesar Rp143 Triliun.

Berikut merupakan rincian dari komponen pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 :

Tabel 4. 8 Pos Pendapatan pada Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos Pendapatan	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan Telepon	14.664	898	649	258	-	16.467
Pendapatan Interkoneksi	368	-	-	7.419	-	7.787
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	64.500	-	-	-	-	64.500
Internet, Komunikasi dan jasa informatika		240	7.976	2.056	-	10.272
SMS	4.728	-	26	-	-	4.754
Lain-lain	-	-	1.596	922	180	2.698
Pendapatan Jaringan	4	-	1.087	789	-	1.880

Pos Pendapatan	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan Indihome	-	23.720	2.605	-	-	26.325
Layanan Lainnya	3	72	5.194	395	451	6.115
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	84.267	24.928	19.133	11.839	631	140.798
Pendapatan dari transaksi <i>lessor</i>	-	-	-	2.412	-	2.412
Penyesuaian	-	2	8	4	(426)	
Jumlah Pendapatan	84.267	24.930	19.141	14.255	205	143.210

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan data diatas, yang termasuk kedalam *Mobile* meliputi : Pendapatan telepon, pendapatan interkoneksi, Pendapatan internet dan data selular, *SMS*, dan Pendapatan jaringan dengan jumlah pendapatan *Mobile* sebesar Rp84.267 triliun, Pendapatan *Consumer* meliputi: Pendapatan telepon, Jasa teknologi informatika, Pendapatan indihome, Pendapatan layanan lainnya dengan jumlah pendapatan *Consumer* sebesar Rp24,930 triliun. Pendapatan *Enterprise* meliputi : penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan pendapatan lainnya dengan jumlah pendapatan *Enterprise* sebesar Rp19,141 triliun. Pendapatan *WIB* terdiri dari jasa interkoneksi dan jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya dengan jumlah pendapatan *WIB* sebesar Rp14,255 triliun. Total pendapatan konsolidasian tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp143,210 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp136,462 miliar.

4.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah menerapkan PSAK 72 (2017)

4.3.1 Pengakuan PSAK 72 (2021) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal transisi PSAK 72, implementasi imbalan variabel dan waktu pengakuan pendapatan menyebabkan perusahaan mengakui kenaikan laba ditahan sebesar pendapatan yang diakui atas kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan berdasarkan PSAK 72, hal ini karena pendapatan yang diakui lebih besar dari standar sebelumnya. Perusahaan mengakui aset kontrak sebagai hak perusahaan atas imbalan kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Aset kontrak selanjutnya direklasifikasi sebagai piutang usaha ketika seluruh kewajiban atas imbalan telah diselesaikan.

Perusahaan juga mengkapitalisasi biaya inkremental untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dengan pelanggan. Berbeda dengan standar sebelumnya yang mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya – biaya ini pada saat terjadi,

biaya kontrak dikapitalisasi dan diamortisasi secara konsisten seiring dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan biaya kontrak.

4.3.2 Penyajian PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan telah mengimplementasikan PSAK 72 sejak 1 Januari 2020 menggunakan pendekatan retrospektif dimodifikasi, yang berarti perusahaan tidak menyajikan kembali angka perbandingan tetapi penyesuaian terhadap jumlah tercatat pada tanggal transisi diakui dalam saldo awal dari saldo laba kepentingan non pengendali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada perusahaan meliputi :

1. Berdasarkan PSAK 72, Aset kontrak dan liabilitas kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, aset kontrak dilaporkan sebagai piutang usaha dan liabilitas kontrak dilaporkan sebagai pendapatan diterima dimuka.
2. Biaya kontrak yang terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya biaya ini dibebankan pada saat terjadinya atau diamortisasi dengan dasar sistematis yang tidak konsisten dengan pengakuan pendapatan terkait.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Pengakuan Pendapatan Sebelum Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019

Pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019, berikut ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan perusahaan untuk setiap jenis pendapatan :

1. Pendapatan Telepon Seluler

Rincian pendapatan telepon seluler	Pengakuan
- Pascabayar (Pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan) Prabayar	- Berdasarkan penggunaan pelanggan dan pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.
- Prabayar (Penjualan kartu perdana dan Voucher isi ulang)	- Diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan.

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, rincian dari pendapatan telepon seluler yaitu pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui berdasarkan penggunaan pelanggan dan pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucher prabayar telah habis masa berlakunya.

2. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Rincian pendapatan sambungan telepon tidak bergerak	Pengakuan
Layanan telepon tidak bergerak kabel	Diakui pada saat pelanggan memakai telepon
Layanan telepon tidak bergerak nirkabel	

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan. Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

3. Pendapatan Indihome

Pendapatan Indihome berasal dari pelanggan *consumer* yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk *retail*. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan dan pendapatan diakui secara bulanan sesuai tagihan paket Indihome. Penerimaan dari instalasi sambungan Indihome ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

4. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan Internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

5. Pendapatan Data, Internet, Dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat. Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

6. Pendapatan Jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkuit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

7. Pendapatan Lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan. Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan. Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan

Berdasarkan uraian diatas, Pada tahun 2019 rincian pendapatan dari PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terdapat enam produk yang diakui oleh perusahaan yaitu Pendapatan Telepon Seluler, Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak, Pendapatan Indihome, Pendapatan Interkoneksi, Pendapatan Data, Internet, Dan Jasa Teknologi Informatika, Pendapatan Jaringan, Dan Pendapatan Lainnya.

4.4.2 Pengakuan Pendapatan Sesudah Penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020

Pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020, berikut ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan perusahaan untuk setiap jenis pendapatan :

1. *Mobile*

Rincian pendapatan <i>Mobile</i>	Pengakuan
- Layanan Telepon	- Layanan ditawarkan secara pascabayar/prabayar diakui sebagai liabilitas kontrak
- Layanan Interkoneksi	
- Layanan internet dan data	
- Layanan SMS	- Metode <i>output</i> , baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan

	mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.
--	--

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain : layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana yang untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher pengisian awal) dan voucher pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai liabilitas kontrak. Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

2. *Consumer*

Rincian pendapatan <i>Consumer</i>	Pengakuan
<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan telepon tidak bergerak - Layanan Indihome 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak - Pendapatan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel - Menggunakan metode <i>output</i> berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan. Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome".

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli.

3. *Enterprise*

Rincian pendapatan <i>Enterprise</i>	Pengakuan
<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa telepon - Data dan internet - Teknologi informasi - Pendapatan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa perjanjian dengan pelanggan <i>Enterprise</i> ditawarkan sebagai produk bundel. Produk atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. - Pendapatan dari pelanggan <i>enterprise</i> diakui sepanjang waktu menggunakan metode <i>output</i> berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu sedangkan pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana

produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai atau ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang di harapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

4. *Wholesale and International Business Services* (“WIB”)

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

4.4.3 Perbandingan Komponen Pendapatan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 4. 9 Perbandingan Komponen Pendapatan dalam pos-pos Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2020

2019	2020
Berdasarkan produk	Berdasarkan customer
Pendapatan Telepon seluler	Reklasifikasi ke <i>Mobile Customer</i>
Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak	Reklasifikasi ke <i>Consumer Customer</i>
Pendapatan Indihome	Reklasifikasi ke <i>Consumer Customer</i>
Pendapatan Interkoneksi	Reklasifikasi ke <i>Wholesale and International Business (WIB)</i>
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	Reklasifikasi ke <i>Enterprise Costumer</i>
Pendapatan Jaringan	Reklasifikasi ke <i>Mobile</i>
Pendapatan Lainnya	Reklasifikasi ke <i>Enterprise Costumer</i>

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, PT Telekomunikasi pada tahun 2019 mencatat komponen pendapatan berdasarkan produk yaitu Pendapatan Telepon seluler, Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak, Pendapatan Indihome, Pendapatan Interkoneksi, Pendapatan data, Internet, dan jasa teknologi informatika, Pendapatan jaringan, dan pendapatan lainnya. Sedangkan pada tahun 2020 PT Telekomunikasi mencatat komponen pendapatan berdasarkan *customer* dan menjadi empat golongan yaitu; Pendapatan telepon seluler direklasifikasi ke *Mobile Customer*, Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak dan pendapatan indihome direklasifikasi ke *Consumer Customer*, *Pendapatan interkoneksi* direklasifikasi ke *WIB Costumer*, Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika di reklasifikasi ke *Enterprise Costumer*, Pendapatan jaringan direklasifikasi ke *Mobile Costumer*, Pendapatan Lainnya direklasifikasi ke *Enterprise Costumer*. Dalam perbedaan ini

tidak mempengaruhi pendapatan dari laba rugi secara signifikan, tetapi hanya menerapkan metode yang seragam untuk setiap jenis pendapatan.

4.4.4 Perbandingan Penyajian pada Pos-pos Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021

Berikut ini perbandingan penyajian pos aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2020 :

Tabel 4. 10 Pos-pos Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019-2021 (dalam Miliaran Rupiah)

Pos-pos Laporan Posisi Keuangan	2019	2020	2021
ASET LANCAR			
Piutang usaha	11.797	11.339	8.510
Aset Kontrak	-	1.036	2.330
Biaya Kontrak	-	454	656
Jumlah Aset Lancar	11.979	12.829	11.496
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Kontrak	-	203	143
Biaya Kontrak	-	1.254	1.608
jumlah Aset Tidak Lancar		1.457	1.751
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pendapatan diterima dimuka	7.352		
Liabilitas Kontrak	-	7.834	6.795
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan diterima dimuka	803		
Liabilitas Kontrak		1.004	1.283

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2019 PT Telekomunikasi masih menggunakan kebijakan lama sehingga yang tercatat Piutang usaha sebesar Rp11,797 triliun dan pendapatan diterima dimuka Rp8,155 triliun.

Pada tahun 2020 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk mulai menerapkan standar kebijakan baru yaitu adanya penambahan akun “Aset Kontrak” dan “Biaya Kontrak”. Piutang usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,339 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 sesuai kebijakan sebagian piutang usaha diakui oleh Aset kontrak yang tercatat sebesar Rp203 miliar dan ada penambahan akun biaya kontrak sebesar Rp454 miliar sehingga jumlah aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan tercatat sebesar Rp14,286 triliun. Pada pos liabilitas, adanya akun baru yaitu liabilitas kontrak penggantian dari akun pendapatan diterima dimuka pada kebijakan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,838 triliun.

Pada tahun 2021, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sudah konsisten menerapkan PSAK 72 dengan piutang usaha mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tercatat sebesar Rp8,510 triliun, Aset kontrak lancar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan tercatat sebesar Rp2,330 triliun. Dan liabilitas kontrak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp8,078 triliun.

4.4.5 Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020

Berikut ini merupakan dampak dari pengimplementasian PSAK 72 (2017) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 :

Tabel 4. 11 Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 (dalam Miliaran Rupiah)

A. Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan	Standar Baru (PSAK 72)	Standar Sebelumnya (PSAK 23)	Dampak Penyesuaian
Aset lancar			
Piutang usaha	11.339	12.405	(1.066)
Aset Kontrak	1.036	-	1.036
Biaya Kontrak	454	-	454
Aset Tidak Lancar			
Aset Kontrak – tidak lancar	203	-	203
Biaya Kontrak – tidak lancar	1.254	-	1.254
Liabilitas			
Pendapatan diterima dimuka	-	7.834	(7.834)
Liabilitas Kontrak	7.834	-	7.834
Pendapatan diterima dimuka – jangka pendek	-	1.004	(1.004)
Liabilitas Kontrak	1.004	-	1.004

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Diolah 2023

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dampak perubahan kebijakan akuntansi pada pos-pos laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yaitu jika perusahaan menerapkan standar sebelumnya piutang usaha tahun 2020 tercatat Rp20,589 triliun, sedangkan jika perusahaan menerapkan standar baru piutang usaha tercatat mengalami penurunan menjadi Rp11,339 triliun. Hal ini disebabkan sebagian piutang diakui sebagai Aset kontrak sebesar Rp1,036 triliun dikarenakan pada akhir periode ada beberapa kontrak yang belum terselesaikan. Pada aset tidak lancar juga tercatat adanya aset kontrak sebesar Rp 203 miliar. Biaya Kontrak yang terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan

terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan penyesuaian biaya kontrak sebesar Rp1,708 triliun. Jika standar sebelumnya perusahaan mencatat sebagai pendapatan diterima dimuka, namun dengan adanya standar baru maka direklasifikasi menjadi liabilitas kontrak dengan penyesuaian liabilitas kontrak jangka pendek sebesar Rp 7,834 triliun dan liabilitas kontrak jangka panjang sebesar Rp 1,004 triliun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada saat sebelum penerapan PSAK 72, seluruh transaksi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk bersifat *Rule Based*, yaitu pendapatan diakui pada saat selepas terjadinya transaksi.
2. Pada saat setelah melakukan penerapan PSAK 72 seluruh transaksi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk bersifat *Principal Based*, yaitu pendapatan diakui ketika penjual telah memenuhi hak dan kewajiban kepada pelanggan.
3. Perbandingan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terletak pada pengakuan pendapatan perusahaan. Sebelum penerapan PSAK 72, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menganggap setiap terjadinya transaksi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka, namun setelah menerapkan kebijakan PSAK 72 perusahaan bisa mengakui pendapatan setelah kontrak selesai dan diakui sebagai liabilitas kontrak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai penerapan PSAK 72 yang dilakukan secara kontrak maupun non kontrak sehingga pihak – pihak yang berkepentingan juga bisa melihat kebijakan kontrak yang diatur dalam perusahaan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan studi kasus secara langsung terhadap objek penelitian dalam melakukan analisis penerapan akuntansi terutama tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dengan dilakukan studi kasus secara langsung, diharapkan penelitian mendapatkan hasil lebih aktual karena mendapatkan informasi langsung dari objek penelitian. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan analisis penerapan PSAK 72 dengan lebih dari satu perusahaan atau objek dalam satu sektor yang sama, sehingga mampu dilakukan perbandingan seberapa mampu sebuah perusahaan menerapkan PSAK 72 dalam setiap transaksi yang dilakukan dan dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almayda, et al (2020). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Pos indonesia (persero) Manado.*Jurnal*. Volume 8 No.4 Oktober 2020, Hal. 1154-1161
- Asrika, Yuni. 2020. *Analisis Penerapan Akuntansi Agrikultur (PSAK 69) Pada Perusahaan Subsektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018*. Skripsi. Universitas Pakuan
- Bahri, Syaiful.2019.*Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Febriani, Dias P. 2020.*Dampak Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK72 Terhadap perusahaan Real Estat*.Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Harahap. 2018. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition*. Cetakan Ketiga. PT. Gramedia : Jakarta.
- Hidayat, Ayu Rifatul.2021.*Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi di Masa Pandemi COVID-19*.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 : Pendapatan*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK)72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK)1 : Penyajian Laporan Keuangan*
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK)25 : Kebijakan Akuntansi*
- Indriana, Sartika. 2020. *Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek Ppn Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)*. Skripsi. Universitas Pakuan
- Indotelko (2019) Kisah Telkom terapkan PSAK 71, 72, dan 73 . tersedia di : <https://www.indotelko.com/read/1557446052/kisah-telkom-73> [diakses pada Febuari 2022]

- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Murhadi, Werner R., (2018), *Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham*, Cetakan ke-3, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12160.
- Nurafifah. 2023. *Pengaruh penerapan psak 72 terhadap kinerja keuangan subsektor industri konstruksi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022*.Skripsi.Universitas Islam Negeri.
- Pratiwi Yuli, et al (2021). Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Nexusled Cahaya Lestari. *Jurnal*. Volume 1, No.1, 2021: 61-70
- Sabirah, Haifa. 2018. Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Lq-45 Tahun 2018). *Jurnal*. Univrsitas Brawijaya
- Sholicah Mumiatus, Anggraini Fitria (2021). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada penjualan ekspor udang PT. Madsumaya indo seafood. *Jurnal*. Volume 5 No. 1, 2021
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Qalbi. A. Bahrul (2021).*Analisis dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 Terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur Sektor perindustrian yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)*.Skripsi. Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Cristy
Alamat : Jl Jati Raya RT 02 RW 08 Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 24 Mei 1998
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Mekarjaya 11
• SMP : SMPN 12 Depok
• SMA : SMKN 1 Depok
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2023

Peneliti

Maya Cristy

LAMPIRAN

1. Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2019
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2019
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	554
Piutang Usaha – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	
Pihak berelasi	1.792
Pihak ketiga	10.005
Piutang lain-lain-setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	292
Persediaan- setelah dikurangi provisi persediaan usang	585
Aset tersedia untuk dijual	39
Pajak dibayar dimuka	2.569
Tagihan restitusi pajak	992
Aset lancar lainnya	6.652
Jumlah Aset Lancar	41.722
ASET TIDAK LANCAR	
Penyertaan jangka panjang	1.944
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan	156.973
Aset tak berwujud-setelah dikurangi akumulasi amortisasi	6.446
Aset pajak tangguhan – bersih	2.898
Aset tidak lancar lainnya	11.225
Jumlah aset tidak lancar	179.486
JUMLAH ASET	221.208
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	819
Pihak ketiga	13.078
Utang lain-lain	449
Utang pajak	3.431
Beban yang masih harus dibayar	13.736
Pendapatan diterima dimuka – jangka pendek	7.352
Uang muka pelanggan	1.289
Utang bank jangka pendek	8.705
Pinjaman	9.510
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	58.369
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	1.230
Pendapatan diterima dimuka- jangka panjang	803
Pinjaman jangka panjang	33.869
Liabilitas lainnya	543
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	45.589
JUMLAH LIABILITAS	103.958
EKUITAS	
Modal saham	4.953
Tambahan modal disetor	2.711
Komponen ekuitas lainnya	408
Saldo Laba	

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2019
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2019
Ditentukan penggunaannya	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	76.152
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik entitas-induk bersih	99.561
Kepentingan non pengendali	17.689
JUMLAH EKUITAS	117.250
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	221.208

2. Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2019
PENDAPATAN	135.567
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(42.226)
Beban penyusutan dan amortisasi	(23.178)
Beban karyawan	(13.012)
Beban interkoneksi	(5.077)
Beban umum dan administrasi	(6.696)
Beban pemasaran	(3.724)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(86)
Penghasilan lain-lain - bersih	826
LABA USAHA	42.394
Penghasilan pendanaan	1.092
Biaya pendanaan	(4.240)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	(166)
Rugi penurunan nilai investasi	(1.172)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	37.908
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	
Pajak kini	(10.619)
Pajak tangguhan	303
	(10.316)
LABA TAHUN BERJALAN	27.592

3. Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2020
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2020
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	1.303
Piutang Usaha	
Pihak berelasi	1.644
Pihak ketiga	9.695
Aset kontrak	1.036
Piutang lain-lain	214
Persediaan	983
Biaya kontrak	454
Pajak dibayar dimuka	3.170
Tagihan restitusi pajak	854
Aset lancar lainnya	6.561
Jumlah Aset Lancar	46.503
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Kontrak	203
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	192
Biaya kontrak	1.254
Aset tetap	160.923
Aset hak guna	18.566
Aset tak berwujud	6.846
Aset pajak tangguhan – bersih	3.578
Aset tidak lancar lainnya	4.833
Jumlah Aset Tidak Lancar	200.440
JUMLAH ASET	246.943
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	928
Pihak ketiga	16.071
Liabilitas kontrak	7.834
Utang lain-lain	578
Utang pajak	2.713
Beban yang masih harus dibayar	14.265
Pendapatan diterima dimuka – jangka pendek	-
Deposit pada pelanggan	2.024
Utang bank jangka pendek	9.934
Pinjaman	9.350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	69.093
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	561
Pendapatan diterima dimuka- jangka panjang	-
Pinjaman jangka panjang	30.561
Liabilitas lainnya	384
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	56.961

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2020
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2020
JUMLAH LIABILITAS	126.054
EKUITAS	
Modal saham	4.953
Tambahan modal disetor	2.711
Komponen ekuitas lainnya	374
Saldo Laba	
Ditentukan penggunaannya	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	79.152
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik entitas-induk bersih	102.527
Kepentingan non pengendali	18.362
JUMLAH EKUITAS	120.889
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	246.943

4. Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2020
PENDAPATAN	136.462
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(34.593)
Beban penyusutan dan amortisasi	(28.892)
Beban karyawan	(14.390)
Beban interkoneksi	(5.406)
Beban umum dan administrasi	(6.511)
Beban pemasaran	(3.482)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(86)
Penghasilan lain-lain - bersih	403
LABA USAHA	43.505
Penghasilan pendanaan	799
Biaya pendanaan	(4.520)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	(246)
Rugi penurunan nilai investasi	(763)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	38.775
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	
Pajak kini	(9.798)
Pajak tangguhan	586
	(9.212)
LABA TAHUN BERJALAN	29.563

5. Laporan Posisi Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2021
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2021
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	38.311
Aset keuangan lancar lainnya	493
Piutang Usaha	
Pihak berelasi	961
Pihak ketiga	7.549
Aset kontrak	2.330
Piutang lain-lain	195
Persediaan	779
Biaya kontrak	656
Pajak dibayar dimuka	2.144
Tagihan restitusi pajak	690
Aset lancar lainnya	6.351
Jumlah Aset Lancar	61.277
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Kontrak	143
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	13.661
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	139
Biaya kontrak	1.608
Aset tetap	165.026
Aset hak guna	18.469
Aset tak berwujud	7.506
Aset pajak tangguhan – bersih	3.824
Aset tidak lancar lainnya	5.531
Jumlah Aset Tidak Lancar	215.907
JUMLAH ASET	277.184
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	497
Pihak ketiga	16.673
Liabilitas kontrak	6.795
Utang lain-lain	609
Utang pajak	3.923
Beban yang masih harus dibayar	15.885
Deposit pada pelanggan	2.416
Utang bank jangka pendek	6.682
Pinjaman	9.690
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	69.131
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	1.158
Pinjaman jangka panjang	36.319
Liabilitas kontrak	1.283
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	1.206

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2021
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2021
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja	11.563
Liabilitas sewa	10.426
Liabilitas lainnya	669
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	62.654
JUMLAH LIABILITAS	131.785
EKUITAS	
Modal saham	4.953
Tambahan modal disetor	2.711
Komponen ekuitas lainnya	9.395
Saldo Laba	
Ditentukan penggunaannya	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	89.250
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik entitas-induk bersih	121.646
Kepentingan non pengendali	23.753
JUMLAH EKUITAS	145.399
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	277.184

6. Laporan Laba Rugi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021

Perusahaan Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	2021
PENDAPATAN	143.210
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(38.133)
Beban penyusutan dan amortisasi	(31.816)
Beban karyawan	(15.524)
Beban interkoneksi	(5.181)
Beban umum dan administrasi	(5.016)
Beban pemasaran	(3.633)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi	3.432
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	50
Penghasilan lain-lain – bersih	174
LABA USAHA	47.563
Penghasilan pendanaan	558
Biaya pendanaan	(4.365)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	(78)
Rugi penurunan nilai investasi	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	43.678
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	
Pajak kini	(93.678)
Pajak tangguhan	(174)
	(9.730)
LABA TAHUN BERJALAN	33.948

